

Katalog BPS: 9302023.1604

PRODUK DOMESTIK REGIONAL MENURUT PENGELUARAN

Kabupaten Lahat

2014-2018

<https://lahatkab.bps.go.id>



*Badan Pusat Statistik
Kabupaten Lahat*

PRODUK DOMESTIK REGIONAL MENURUT PENGELUARAN

Kabupaten Lahat

2014-2018

<http://lahat.go.id>

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN LAHAT
MENURUT PENGELUARAN 2014- 2018**

ISBN : 978-602-6376-08-4
Nomor Publikasi : 16040.1802
Katalog BPS : 9302023.1604
Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : xii + 62 halaman

Naskah:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

Dicetak Oleh:
CV. Syamil

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN LAHAT
MENURUT PENGELUARAN 2014- 2018**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Tri Ratna Dewi, S.Si., MM

Editor : Ir. Hj. Chairanita K, M.Si

Penulis : Verawati, S.E., M.Si

Pengolah Data : Verawati, S.E., M.Si

<https://lahatkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Lahat, Agustus 2019

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Lahat,

Ir. Hj. Chairanita K, M.Si

<https://lahatkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xi
Daftar Lampiran	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	4
BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA	5
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	6
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	9
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	12
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	14
2.5 Perubahan Inventori	19
2.6 Ekspor Impor	23
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN LAHAT BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2014-2018	25
3.1 Tinjauan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran	27
3.2 Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	33
3.3 Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	37
3.4 Konsumsi Akhir Pemerintah	38
3.5 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	39
3.6 Perkembangan Perubahan Inventori	41
3.7 Perkembangan Ekspor	42
3.8 Perkembangan Impor	43

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN LAHAT TAHUN 2014-2018	45
	4.1 PDRB (Nominal)	47
	4.2 Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	48
	4.3 Incremental Capital Output Ratio (ICOR).....	48
BAB V	PENUTUP	51
	LAMPIRAN	53
	DAFTAR PUSTAKA	61

<https://lahatkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 28
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 28
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 30
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 31
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 32
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 33
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 34
Tabel 8	Pertumbuhan Rill Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 36
Tabel 9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 36
Tabel 10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRRT Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 37
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 38
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 40
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 42
Tabel 14	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 43
Tabel 15	Perkembangan Impor Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 44
Tabel 16	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018 47

Tabel 17	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018	48
Tabel 18	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018	49

<https://lahatkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1 Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lahat, Tahun 2014-2018 (Miliar Rupiah).....	29

<https://lahatkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran, 2014-2018 (Juta Rupiah)..	54
Lampiran 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran, 2014-2018 (Juta Rupiah)..	55
Lampiran 1.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran, 2014-2018 (Persen).....	56
Lampiran 1.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran, 2014-2018 (Persen).....	57
Lampiran 1.5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran, 2014-2018.....	58
Lampiran 1.6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran, 2014-2018 (Persen).....	59

<https://lahatkab.bps.go.id>

<https://lahatkab.bps.go.id>

BAB I ***PENDAHULUAN***

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi

11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran,

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

1. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga
2. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga
3. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto
5. Perubahan inventori
6. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

https://lahatkab.bps.go.id

BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sbb:

1. Makanan dan Minuman Tidak Beralkohol
2. Minuman Beralkohol, Tembakau dan Narkotik
3. Pakaian dan alas kaki
4. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya
5. *Furniture*, Perlengkapan Rumah Tangga dan Pemeliharaan Rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/Hiburan dan Kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan Makan Minum dan Penginapan/Hotel
12. Barang dan Jasa Lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki

3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- ❖ Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
 Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- ❖ Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- ❖ Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- ❖ Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- ❖ Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- ❖ Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.
- ❖ Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal didalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- ❖ Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *mendeflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;

3. Terhadap data poin ke-3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
4. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau *surplus*, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan *surplus*

melalui kegiatan produktifnya, namun *surplus* yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu:

1. Organisasi Kemasyarakatan
2. Organisasi Sosial
3. Organisasi Profesi
4. Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olah Raga/Hobi
5. Lembaga Swadaya Masyarakat
6. Lembaga Keagamaan
7. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

- a. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenis-nya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang

diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup :

- a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi;
- b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan;
- c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi;
- d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

1. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
2. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
3. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
4. Output Bank Indonesia (BI)
5. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementrian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

- a. PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar} - \text{penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yg dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PK-P Provinsi ADHB, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Pengeluaran konsumsi pemerintah ADHK dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Regional Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i. Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii. Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri

serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii. Cakupan

Pembentukan Modal Tetap Bruto terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
1. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
1. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.

- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh

berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan mendeflate PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “reflate” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak

tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men“deflate” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tidak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara mendeflate nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tidak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaikinya diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

i. Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii. Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;

- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori adh Berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- Menghitung posisi inventori adh Konstan, dengan cara mendeflate stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- Menghitung perubahan inventori adh Konstan dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- Menghitung perubahan inventori adh Berlaku dengan menginflate perubahan inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga

masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan:

- a. *Mendeflate* nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai
- b. Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR IMPOR

i. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan dibidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor disuatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah atau pun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii. Cakupan

Ekspor-Impor pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
- b. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv. Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI

- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

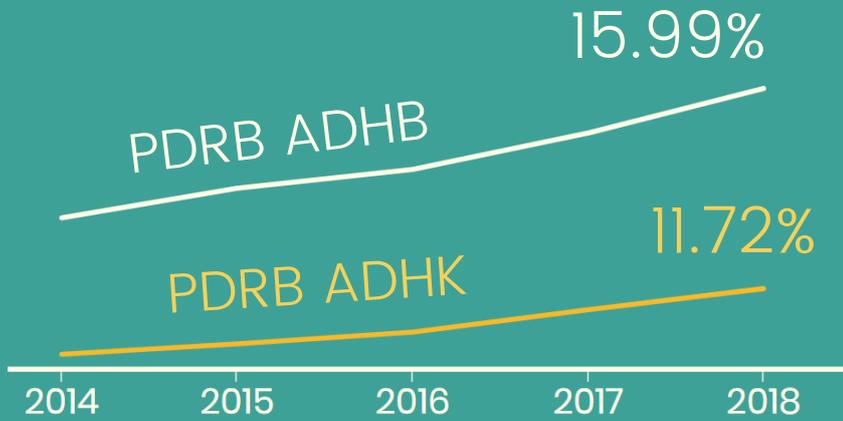
2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

***BAB III
TINJAUAN PEREKONOMIAN
KABUPATEN LAHAT
BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN
2014 - 2018***

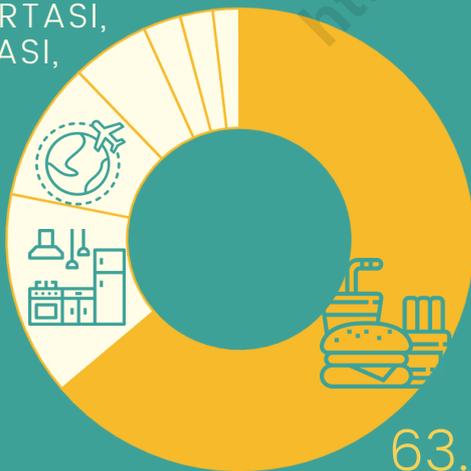
TINJAUAN PEREKONOMIAN PDRB PENGELUARAN

KABUPATEN LAHAT



KONSUMSI RUMAH TANGGA

8.91%
TRANSPORTASI,
KOMUNIKASI,
DAN
REKREASI

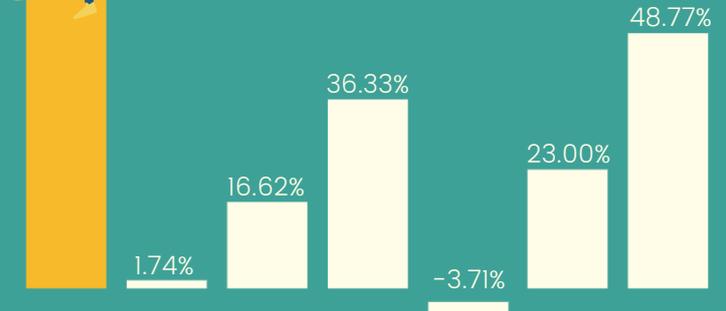


14.35%
PERLENG-
KAPAN
RUMAH
TANGGA

63.81%
MAKANAN,
MINUMAN,
DAN ROKOK

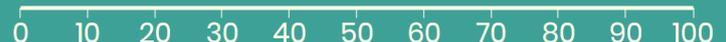
DISTRIBUSI PDRB

74.79%



PROPORSI PMTB

71.74% 28.26%
BANGUNAN NON-BANGUNAN



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LAHAT

Perubahan struktur ekonomi Kabupaten Lahat akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2015 s.d 2018, tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Data yang ada menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Lahat digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPR, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN LAHAT MENURUT PENGELUARAN

Kondisi perekonomian Kabupaten Lahat menunjukkan tanda pemulihan, setelah berlalunya masa krisis yang melanda ekonomi dunia sejak tahun 2008. Hal ini terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui Nilai PDRB ADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB.

**Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

<i>(Miliar Rp)</i>					
Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	9 507,15	10 018,80	10 672,85	11 216,17	11 957,24
2. Konsumsi LNPRT	206,53	221,25	242,76	254,84	278,15
3. Konsumsi Pemerintah	1 851,68	1 970,23	1 969,08	2 344,15	2 656,59
4. PMTB	5 063,05	5 041,85	5 322,64	5 614,57	5 808,39
5. Perubahan Inventori	-291,82	-303,35	-497,71	-648,69	-592,60
6. Ekspor	1 963,11	1 936,16	1 777,45	3 535,35	3 676,65
7. Impor	5 070,52	5 027,10	5 224,38	7 281,04	7 797,53
Total PDRB	13 229,17	13 857,85	14 262,70	15 035,35	15 986,88

Nilai PDRB Kabupaten Lahat (adh Berlaku) selama periode tahun 2014 s.d. 2018 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

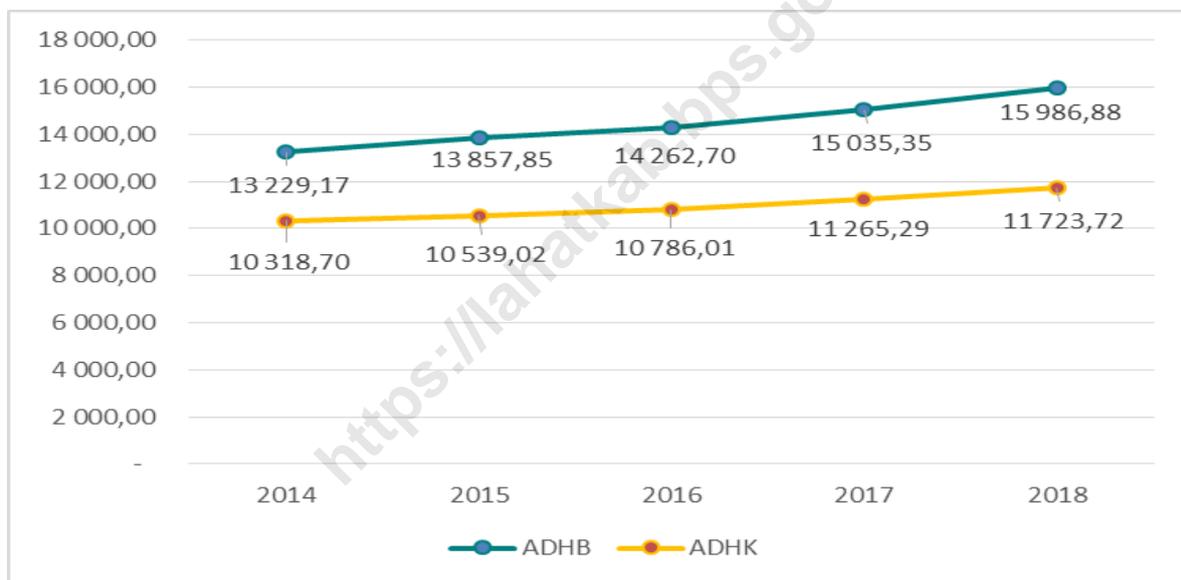
**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lahat
Tahun 2014-2018**

<i>(Miliar Rp)</i>					
Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	6 902,13	7 117,18	7 351,42	7 589,14	7 925,96
2. Konsumsi LNPRT	161,79	170,37	176,90	183,82	194,83
3. Konsumsi Pemerintah	1 409,83	1 468,63	1 399,34	1 549,88	1 673,24
4. PMTB	3 998,25	4 002,26	4 157,95	4 350,65	4 460,36
5. Perubahan Inventori	-80,81	-255,40	-171,80	-640,73	-967,78
6. Ekspor	2 222,28	1 946,69	1 774,97	3 520,36	3 649,41
7. Impor	4 294,77	3 910,72	3 902,79	5 287,82	5 212,30
Total PDRB	10 318,70	10 539,02	10 786,01	11 265,29	11 723,72

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010.

Melalui pendekatan penghitungan adh Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2014–2018, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Lahat berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.

Grafik 1. Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lahat, Tahun 2014 - 2018 (Miliar Rupiah)



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam penghitungan PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor dikurangi impor.

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lahat
Tahun 2014 – 2018**

Komponen Pengeluaran	<i>(Persen)</i>				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	71,87	72,30	74,83	74,60	74,79
2. Konsumsi LNPRT	1,56	1,60	1,70	1,69	1,74
3. Konsumsi Pemerintah	14,00	14,22	13,81	15,59	16,62
4. PMTB	38,27	36,38	37,32	37,34	36,33
5. Perubahan Inventori	-2,21	-2,19	-3,49	-4,31	-3,71
6. Ekspor	14,84	13,97	12,46	23,51	23,00
1. Impor	38,33	36,28	36,63	48,43	48,77
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa selama periode 2014 – 2018, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (rata-rata di atas 60 persen). Impor juga masih mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 36 s.d. 49 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor, baik luar negeri, luar provinsi maupun luar kabupaten. Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 36 s.d. 39 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 13 s.d 17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Lahat
Tahun 2014 – 2018**

Komponen Pengeluaran	(Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,43	3,12	3,29	3,23	4,44
2. Konsumsi LNPRT	11,19	5,30	3,84	3,91	5,99
3. Konsumsi Pemerintah	2,93	4,17	-4,72	10,76	7,96
4. PMTB	2,28	0,10	3,89	4,63	2,52
5. Perubahan Inventori	-159,74	216,05	-32,73	272,95	51,04
6. Ekspor	8,65	-12,40	-8,82	98,33	3,67
7. Impor	0,42	-8,94	-0,20	35,49	-1,43
Total PDRB	3,84	2,14	2,34	4,44	4,07

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lahat dari tahun 2014 s.d. 2018 secara rata-rata mencapai 3,37 persen, dengan masing-masing pertumbuhan 3,84 persen (2014); 2,14 persen (2015); 2,34 persen (2016); 4,44 persen (2017) dan 4,07 persen (2018). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yakni sebesar 4,443 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2015 (2,14 persen).

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Lahat, Tahun 2014-2018

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	137,74	140,77	145,18	147,79	150,86
2. Konsumsi LNPRT	127,66	129,87	137,23	138,63	142,77
3. Konsumsi Pemerintah	131,34	134,15	140,71	151,25	158,77
4. PMTB	126,63	125,97	128,01	129,05	130,22
5. Perubahan Inventori	361,13	118,77	289,71	101,24	61,23
6. Ekspor	88,34	99,46	100,14	100,43	100,75
7. Impor	118,06	128,55	133,86	137,69	149,60
Total PDRB	128,21	131,49	132,23	133,47	136,36

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Indeks Implisit Kabupaten Lahat dari tahun 2014 s.d. 2018 secara berturut-turut masing-masing menunjukkan 128,21 persen (2014); 131,49 persen (2015); 132,23 persen (2016); 133,47 persen (2017) dan 136,36 persen (2018).

¹ Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lahat, Tahun 2014 – 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	9 507,15	10 018,80	10 672,85	11 216,17	11 957,24
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	6 902,13	7 117,18	7 351,42	7 589,14	7 925,96
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	71,87	72,30	73,84	74,60	74,79
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	96 619,32	100 732,95	106 178,48	110 451,87	110 578,63
b. ADHK 2010	70 144,99	71 558,94	73 135,40	74 734,50	77 275,18
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	24 437,83	25 477,89	26 855,07	27 936,07	29 485,89
b. ADHK 2010	17 741,70	18 099,05	18 497,69	18 902,25	19 544,98
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	4,43	3,12	3,29	3,23	4,44
b. Per-RT	3,25	2,02	2,20	2,19	3,40
c. Perkapita	3,25	2,01	2,20	2,19	3,40
Jumlah RT (<i>unit</i>)	98 398	99 459	100 518	101 548	102 568
Jumlah penduduk (<i>org</i>)	389 034	393 235	397 424	401 494	405 524

Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2014 – 2018 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (*adh Berlaku*) maupun riil (*adh Konstan*), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2014 s.d. 2018 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Titik tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu 74,79 persen.

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Menurut *adh konstan*, pada tahun 2014, secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Lahat menghabiskan dana sekitar 96.619,32 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 100.732,95 ribu rupiah (2015); 106.178,48 ribu rupiah (2016), 110.451,87 ribu rupiah (2017) dan menjadi 116.578,63 ribu rupiah (2018).

Sementara itu, pada perkiraan *adh Konstan* 2010, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga tumbuh pada kisaran 2 persen sampai dengan 4 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 3,40 persen. Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan* 2010. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Lahat meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 2,01 persen s.d. 3,40 persen. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adh Konstan* sebesar 4,43 persen pada tahun 2014. Kemudian, mengalami perlambatan untuk tiga tahun berikutnya, yaitu 3,12 persen (2015); dan 3,29 persen (2016), 3,23 persen (2017) dan kembali meningkat menjadi 4,44 persen (2018). Sementara itu, konsumsi per-kapita mengalami penurunan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 dengan masing-masing besarnya 3,25 persen (2014), dan 2,01 persen (2015), 2,20 persen (2016) dan 2,19 persen (2017). Sedangkan pada tahun 2018 mengalami sedikit peningkatan menjadi 3,40 persen. Nampak bahwa peningkatan keseluruhan konsumsi rumah tangga secara “riil” lebih tinggi dari peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di bawah 2 persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kemakmuran masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melalui perangkat data PDRB ini.

**Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga
Kabupaten Lahat, Tahun 2014 – 2018³**

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	64,57	62,87	62,89	63,11	63,81
b. Pakaian dan Alas Kaki	1,95	1,99	1,92	1,88	1,85
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	13,89	14,70	14,73	14,79	14,35
d. Kesehatan & Pendidikan	5,33	5,54	5,48	5,47	5,39
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	9,60	10,04	10,05	9,88	9,73
f. Hotel & Restoran	2,49	2,58	2,61	2,56	2,60
g. Lainnya	2,16	2,27	2,31	2,31	2,27
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Secara rata-rata dari tahun 2014 s.d. 2018, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Lahat, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 64,57 persen (2014) ; 62,87 persen (2015) ; 62,89 persen (2016), 63,11 persen (2017) dan 63,81 persen (2018).

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat, sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

³Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lahat, Tahun 2014 – 2018

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,20	2,14	3,44	3,44	5,41
b. Pakaian dan Alas Kaki	9,16	4,52	1,64	1,81	3,77
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,95	6,14	4,43	3,43	2,63
d. Kesehatan & Pendidikan	5,18	3,33	3,23	3,64	3,37
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,30	2,91	1,45	1,82	3,15
f. Hotel & Restoran	4,58	5,72	2,42	2,57	2,09
g. Lainnya	1,82	6,91	3,48	3,83	1,70

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk setiap kelompok konsumsi menunjukkan fluktuasi. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Lahat, Tahun 2014 – 2018⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,45	0,46	3,02	3,15	4,23
b. Pakaian dan Alas Kaki	-0,73	2,84	1,34	2,49	2,14
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-0,77	5,11	2,19	4,30	2,84
d. Kesehatan & Pendidikan	-0,67	6,02	2,08	3,27	2,87
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,46	7,06	5,09	6,58	3,30
f. Hotel & Restoran	2,21	3,15	5,34	5,69	6,42
g. Lainnya	-2,04	3,60	4,69	5,84	4,10

⁴Tingkat perubahan harga produk konsumsi

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan pergerakan yang fluktuatif setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2014 pada kelompok makanan sebesar 7,45 persen. Peningkatan harga konsumsi pakaian dan alas kaki tertinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu sebesar 7,06 persen. Pada kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumahtangga, terjadi peningkatan harga yang cukup signifikan pada tahun 2015 mencapai 5,11 persen. Dengan adanya program kesehatan dan pendidikan gratis di Kabupaten Lahat, ternyata penurunan harga pada kelompok ini baru dirasakan pada tahun 2014 yaitu mencapai 0,67 persen. Kemudian pada kelompok berikutnya yaitu Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya, peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2015 hingga 7,06 persen. Pada kelompok hotel dan restoran, peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 6,42 persen. Sedangkan pada Kelompok konsumsi lainnya mengalami deflasi sebesar 2,04 persen di tahun 2014.

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kabupaten Lahat, Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	206,53	221,25	242,76	254,84	278,15
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	161,79	170,37	176,90	183,82	194,83
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,56	1,60	1,70	1,69	1,74

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir LNPRT adh Berlaku sebesar 206,53 miliar rupiah, kemudian meningkat terus hingga pada tahun 2018 nilainya mencapai 278,15 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi LNPRT adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran LNPRT dari sisi kuantitas. Dari tahun 2014-2018, peran LNPRT terhadap total PDRB berkisar antara 1,56 - 1,74 persen.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Lahat serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Lahat, Tahun 2014 - 2018

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	1 851,68	1 970,23	1 969,08	2 344,15	2 656,59
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	1 409,83	1 468,63	1 399,34	1 549,88	1 673,24
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	14,00	14,22	13,81	15,59	16,62
Konsumsi Pemerintah per- kapita (<i>Ribu Rp</i>)					
a. ADHB	4 759,69	5 010,32	4 954,61	5 838,57	6 551,01
b. ADHK 2010	3 623,94	3 734,74	3 521,03	4 167,54	4 126,12
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	2,93	4,17	-4,72	10,76	7,96
b. Konsumsi perkapita	1,76	3,06	-5,72	18,36	-0,99
Jumlah penduduk (<i>org</i>)	389 034	393 235	397 424	401 494	405 524

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2014 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 1.851,68 miliar rupiah, kemudian meningkat

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

terus hingga pada tahun 2018 nilainya mencapai 2.656,59 miliar rupiah. Demikian halnya dengan konsumsi pemerintah adh Konstan 2010, yang juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas.

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami kestabilan yaitu sekitar 13 - 17 persen. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2016 yaitu 13,81 persen, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2018 yang mencapai 16,62 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2014 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 4.759,69 ribu rupiah, dan terus meningkat pada tahun berikutnya hingga tahun 2016 terjadi penurunan dan kembali naik di tahun 2018 (lihat tabel 11).

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) menunjukkan adanya pertumbuhan yang meningkat setiap tahunnya (lihat tabel 11). Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kenaikan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitas. Hal tersebut juga dapat dilihat dari laju pertumbuhannya yang sebesar 1,76 persen pada tahun 2014, dan mengalami deflasi menjadi 5,72 persen di tahun 2016. Namun kembali meningkat pada tahun 2017 di level 18,36 persen. Akan tetapi, kembali deflasi hingga 0,99 persen di tahun 2018.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁶. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses

⁶ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

**Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Lahat, Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	5 063,05	5 041,85	5 322,64	5 614,57	5 808,39
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	3 998,25	4 002,26	4 157,95	4 350,65	4 460,36
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	38,27	36,38	37,32	37,34	36,33
Struktur PMTB ⁷					
a. Bangunan (<i>Miliar Rp</i>) (%)	3 524,94 (69,62)	3 407,15 (67,58)	3 607,34 (67,77)	3 870,62 (68,94)	4 166,92 (71,74)
b. Non Bangunan (<i>Mil Rp</i>) (%)	1 538,11 (30,38)	1 634,70 (32,42)	1 715,31 (32,23)	1 743,95 (31,06)	1 641,47 (28,26)
Total PMTB (<i>Miliar Rp</i>) (%)	5 063,05 (100,00)	5 041,85 (100,00)	5 322,64 (100,00)	5 614,57 (100,00)	5 808,39 (100,00)
Pertumbuhan ⁸ (%)	2,28	0,10	3,89	4,63	2,52
a. Bangunan	1,68	0,18	6,19	6,86	5,79
b. Non Bangunan	3,31	-0,04	0,04	0,67	-3,65
Total PMTB					

Selain peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah), PMTB juga menunjukkan peningkatan baik secara nominal maupun riil. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2014 - 2018 berfluktuasi dari 2,28 persen (2014) melambat menjadi 0,10 persen (2015), kemudian terjadi percepatan lagi 3,89 persen (2016) dan meningkat lagi sebesar 4,63 persen (2017), dan kemudian kembali melambat menjadi 2,52 persen (2018). Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan meskipun cenderung meningkat tetapi polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB non bangunan.

⁷Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2014 – 2018 (tabel 12). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan “riil” sub komponen bangunan pada tahun 2014 sebesar 1,68 persen. Pada tahun 2015 bangunan mengalami perlambatan dengan pertumbuhan sebesar 0,18 persen. lalu mengalami peningkatan kembali sebesar 6,19 persen (2016), lalu mengalami peningkatan kembali sebesar 6,86 persen (2017), dan pada 2018 pertumbuhan kembali melambat menjadi sebesar 5,79 persen.

Sementara itu, sub komponen non bangunan menunjukkan pola yang sama. Dalam periode tahun 2014 s.d. 2018 pertumbuhan non bangunan mengalami fluktuasi dari 3,31 persen tahun 2014 kemudian deflasi di level 0,04 pada tahun 2015. Lalu meningkat menjadi 0,04 persen (2016) meningkat lagi menjadi 0,67 persen (2017), hingga kembali deflasi menjadi 3,65 persen (2018).

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Lahat, Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	-291,82	-303,35	-497,71	-648,69	-592,60
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	-80,81	-255,40	-171,80	-640,73	-967,78
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	-2,21	-2,19	-3,49	-4,31	-3,71

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2014 perubahan inventori mengalami pengurangan persediaan sebesar 291,82 miliar rupiah, kembali pada tahun 2015 juga mengalami pengurangan persediaan sebesar 303,35 miliar rupiah. Pengurangan terus terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 497,71 miliar rupiah, dan kembali mengalami pengurangan persediaan sebesar 648,69 miliar rupiah pada tahun 2017. dan pada tahun 2018 terus mengalami pengurangan persediaan sebesar 592,60 miliar rupiah.

3.7 PERKEMBANGAN EKSPOR

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar baik luar negeri, luar provinsi maupun luar kabupaten baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

**Tabel 14. Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Lahat, Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	1 963,11	1 936,16	1 777,45	3 535,35	3 676,65
b. ADHK 2000 (Miliar Rp)	2 222,28	1 946,69	1 774,97	3 520,36	3 649,41
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	14,84	13,97	12,46	23,51	23,00
Pertumbuhan ⁹ Ekspor	8,65	-12,40	-8,82	98,33	3,67

Secara total, nilai ekspor Kabupaten Lahat tahun 2018 berfluktuasi namun cenderung meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 nilai ekspor mencapai 1.963,11 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2015 nilai ekspor meningkat menjadi sebesar 1.936,16 miliar rupiah. Selanjutnya sebesar 1.777,45 miliar rupiah (2016), namun pada tahun 2017 melambat menjadi 3.535,35 miliar rupiah, dan kembali meningkat menjadi 3.676,65 miliar rupiah pada tahun 2018. Sejalan dengan nilai ekspor adh Berlaku, nilai ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah pertumbuhan yang sama. Nilai “riil” masing-masing tahun sebesar 2.222,28 miliar rupiah (2014); 1.946,69 miliar rupiah (2015); 1.774,97 miliar rupiah (2016), 3.520,36 miliar rupiah (2017) dan 3.649,41 miliar rupiah (2018). Pertumbuhan rill ekspor mencapai angka yang sangat tinggi pada tahun 2017, sebesar 98,33 persen. Pertumbuhan yang tinggi tersebut disebabkan adanya peningkatan volume ekspor dalam bentuk barang. Sementara itu, ekspor terkontraksi pada tahun 2015 sebesar (minus 12,41 persen) dan tahun 2016 sebesar (minus 8,82 persen).

3.8 PERKEMBANGAN IMPOR

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi Kabupaten Lahat. Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungannya itu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

⁹ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongannya bisa berbeda dengan ekspor.

Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kabupaten Lahat terhadap ekonomi atau produk wilayah lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Lahat di luar wilayah Kabupaten Lahat, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

**Tabel 15. Perkembangan Impor
Kabupaten Lahat, Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor					
a. ADHB (<i>Miliar Rp</i>)	5 070,52	5 027,10	5 224,38	7 281,04	7 797,53
b. ADHK 2010 (<i>Miliar Rp</i>)	4 294,77	3 910,72	3 902,79	5 287,82	5 212,30
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	38,33	36,28	36,63	48,43	48,77
Pertumbuhan ¹⁰ Impor	0,42	-8,94	-0,20	35,49	-1,43

Tabel 15 di atas menunjukkan bahwa pola perkembangan impor Kabupaten Lahat pada periode tahun 2014 s.d. 2018 cenderung meningkat (baik adh Berlaku maupun adh Konstan 2010). Di sisi lain, secara riil pertumbuhan impor pada tahun 2014 adalah sebesar 0,42 persen. Pada tahun berikutnya pertumbuhan impor mengalami kontraksi hingga mencapai 8,94 persen. Kemudian pertumbuhan mengalami kontraksi kembali di tahun 2017 sebesar 0,20 persen dan pada tahun 2017 meningkat sebesar 35,49 persen. Di tahun 2018 pertumbuhan impor kembali mengalami kontraksi dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 1,43 persen.

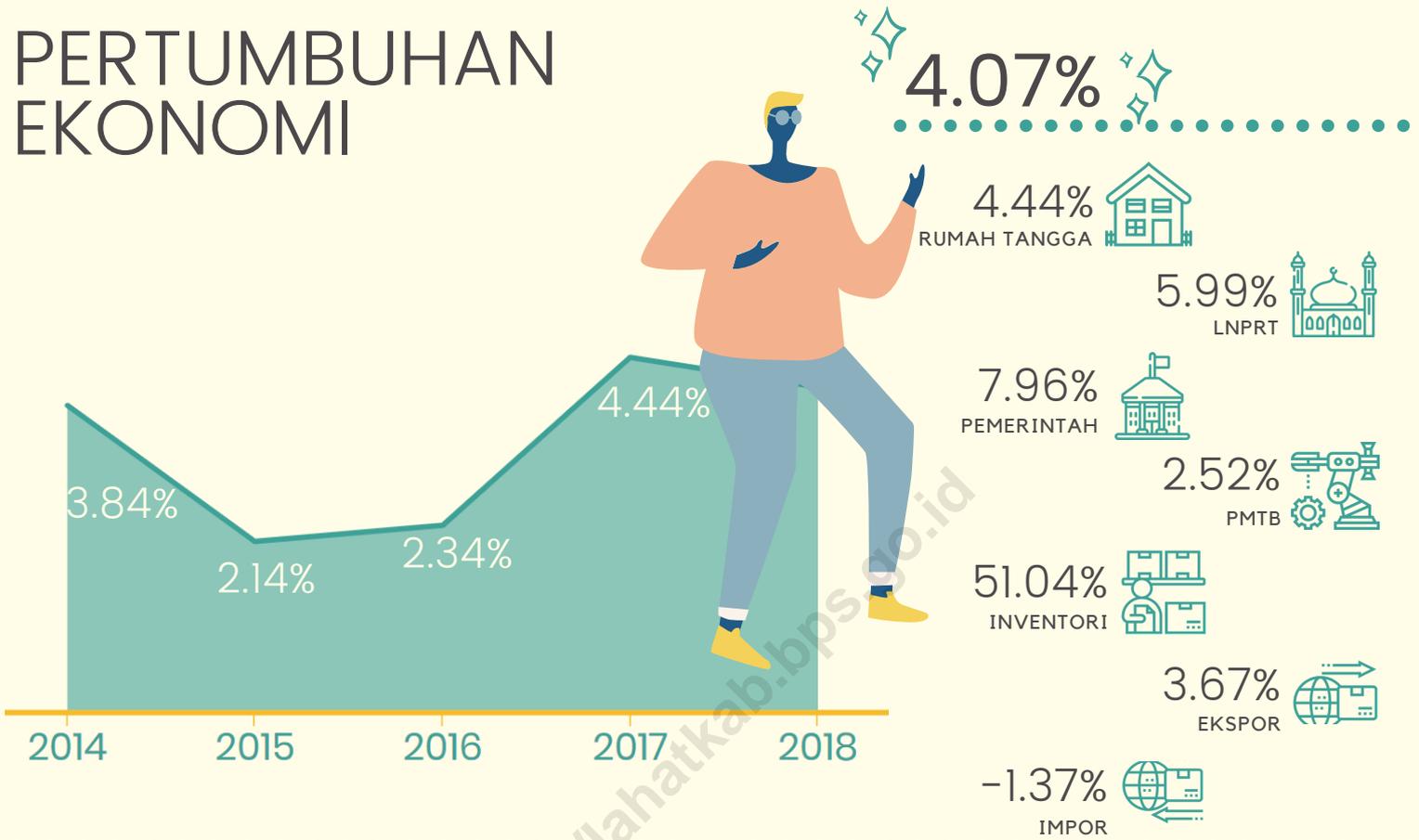
¹⁰ Diturunkan dari perhitungan PDRB (ADHK 2010)

BAB IV

***PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT
PENGELUARAN KABUPATEN LAHAT 2014-2018***

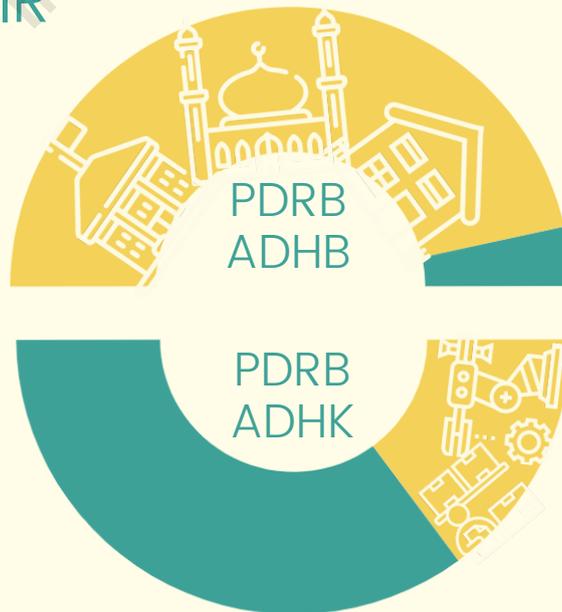
PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN

PERTUMBUHAN EKONOMI



RUMAH TANGGA, PEMERINTAH DAN LNPR KONSUMSI AKHIR

93.15%



PROPORSI TERHADAP PDRB

29.79%
ICOR

PERUBAHAN INVENTORI DAN PMTB



Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

**Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Lahat, Tahun 2014 – 2018**

U r a i a n	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	13 229,17	13 857,85	14 262,70	15 035,35	15 986,88
- ADHK 2010	10 318,70	10 539,02	10 786,01	11 265,29	11 723,72
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	34 005,18	35 240,64	35 887,86	37 448,51	39 422,78
- ADHK 2010	26 523,90	26 800,82	27 139,79	28 058,44	28 910,05
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	2,66	1,04	1,26	3,38	3,04
Jumlah penduduk (<i>org</i>)					
Jumlah penduduk	389 034	393 235	397 424	401 494	405 524
Pertumbuhan					
Pertumbuhan	1,14	1,08	1,07	1,02	1,00

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

**Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB
Kabupaten Lahat Tahun 2014 – 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)					
(Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	9 507,15	10 018,80	10 672,85	11.216,17	11.957,24
b. LNPRT	206,53	221,25	242,76	254,84	278,15
c. Pemerintah	1 851,68	1 970,23	1 969,08	2 344,15	2 656,59
Jumlah	11 565,36	12 210,29	12 884,69	13 815,16	14 891,98
PDRB (ADHB)	13.229,17	13.857,85	14 262,70	15 035,35	15 986,88
(Miliar Rp)					
Proporsi	87,42	88,11	90,34	91,88	93,15

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi.

Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit.

Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 18. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
Kabupaten Lahat Tahun 2014-2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PDRB (ADHK 2010)					
(Miliar Rp)	10 318,70	10 539,02	10 786,01	11.265,29	11 723,72
Perubahan					
(Miliar Rp)	381,32	220,32	246,99	479,29	458,43
PMTB (ADHK 2010)					
(Miliar Rp)	3 998,25	4 002,26	4 157,95	4 350,65	4 460,36
ICOR	10,49	18,17	16,83	9,08	9,73

<https://lahatkab.bps.go.id>

<https://lahatkab.bps.go.id>

BAB V
PENUTUP

1. PDRB menurut penggunaan tahun 2014 s.d. 2018 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Lahat pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir baik untuk tujuan konsumsi akhir investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi investasi dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2014 s.d. 2018 sehingga mudah didalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposable*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan disini seperti ekspor dan impor dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Lahat terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

<https://lahatkab.bps.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1.1

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran, 2014-2018 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	9 507 148,2	10 018 798,1	10 672 848,7	11 216 166,4	11 957 237,2
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	6 138 964,0	6 299 104,8	6 712 488,2	7 078 435,7	7 629 399,8
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	185 348,4	199 236,0	205 205,9	211 298,7	221 427,7
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	1 320 263,8	1 472 996,4	1 571 963,0	1 659 427,7	1 716 043,8
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	506 965,2	555 387,9	585 230,1	613 615,9	645 006,8
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	913 127,9	1 006 031,3	1 072 564,2	1 107 615,8	1 163 606,0
1.f. Hotel dan Restoran	236 819,5	258 258,1	278 610,3	286 736,5	310 463,0
1.g. Lainnya	205 659,3	227 783,6	246 787,0	259 036,0	271 290,1
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	206 527,5	221 254,4	242 763,4	254 838,1	278 153,4
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 851 679,6	1 970 234,9	1 969 080,4	2 344 152,1	2 656 592,5
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	5 063 051,2	5 041 847,6	5 322 645,0	5 614 571,3	5 808 387,5
4.a. Bangunan	3 524 940,8	3 407 149,4	3 607 335,9	3 870 619,6	4 166 917,8
4.b. Non-Bangunan	1 538 110,4	1 634 698,2	1 715 309,1	1 743 951,7	1 641 469,7
5. Perubahan Inventori	(291 824,5)	(303 346,5)	(497 714,1)	(648 688,7)	(592 603,9)
6. Ekspor	1 963 106,3	1 936 161,9	1 777 452,9	3 535 346,4	3 676 649,9
7. Impor	5 070 516,8	5 027 096,8	5 224 381,1	7 281 035,5	7 797 534,8
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	13 229 171,4	13 857 853,7	14 262 695,3	15 035 350,2	15 986 881,8

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 1.2

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran, 2014-2018 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	6 902 126,4	7 117 180,9	7 351 424,3	7 589 138,9	7 925 960,2
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4 313 937,1	4 406 365,0	4 557 832,8	4 714 787,9	4 969 974,6
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	146 160,6	152 774,0	155 273,2	158 083,7	164 039,8
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	971 214,2	1 030 883,9	1 076 538,3	1 113 511,9	1 142 757,7
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	373 668,3	386 118,3	398 578,0	413 090,6	427 028,8
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	745 412,1	767 128,7	778 279,1	792 434,5	817 402,9
1.f. Hotel dan Restoran	178 484,9	188 697,6	193 254,8	198 221,5	202 364,3
1.g. Lainnya	173 249,2	185 213,4	191 668,0	199 008,9	202 392,1
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	161 785,1	170 367,3	176 904,2	183 821,1	194 827,6
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 409 834,6	1 468 629,3	1 399 342,0	1 549 877,4	1 673 240,9
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3 998 248,1	4 002 263,0	4 157 953,2	4 350 646,4	4 460 356,7
4.a. Bangunan	2 502 864,2	2 507 490,8	2 662 631,7	2 845 300,8	3 009 958,8
4.b. Non-Bangunan	1 495 383,9	1 494 772,2	1 495 321,5	1 505 345,6	1 450 397,9
5. Perubahan Inventori	(80 809,4)	(255 396,6)	(171 799,6)	(640 734,4)	(967 776,1)
6. Ekspor	2 222 284,2	1 946 693,7	1 774 973,0	3 520 362,7	3 649 406,3
7. Impor	4 294 768,2	3 910 719,2	3 902 791,9	5 287 817,8	5 212 296,3
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	10 318 700,80	10 539 018,50	10 786 005,19	11 265 294,17	11 723 719,30

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 1.3

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran, 2014-2018 (Persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017* (5)	2018** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	71,87	72,30	74,83	74,60	74,79
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	46,40	45,46	47,06	47,08	53,5
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1,40	1,44	1,44	1,41	1,6
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,98	10,63	11,02	11,04	12,0
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,83	4,01	4,10	4,08	4,5
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	6,90	7,26	7,52	7,37	8,2
1.f. Hotel dan Restoran	1,79	1,86	1,95	1,91	2,2
1.g. Lainnya	1,55	1,64	1,73	1,72	1,9
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,56	1,60	1,70	1,69	1,74
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	14,00	14,22	13,81	15,59	16,62
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	38,27	36,38	37,32	37,34	36,33
4.a. Bangunan	26,65	24,59	25,29	25,74	26,06
4.b. Non-Bangunan	11,63	11,80	12,03	11,60	10,27
5. Perubahan Inventori	-2,21	-2,19	-3,49	-4,31	-3,71
6. Ekspor	14,84	13,97	12,46	23,51	23,00
7. Impor	38,33	36,28	36,63	48,43	48,77
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 1.4

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran, 2014-2018 (Persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017* (5)	2018** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,43	3,12	3,29	3,23	4,44
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,20	2,14	3,44	3,44	5,41
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	9,16	4,52	1,64	1,81	3,77
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	8,95	6,14	4,43	3,43	2,63
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	5,18	3,33	3,23	3,64	3,37
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	5,30	2,91	1,45	1,82	3,15
1.f. Hotel dan Restoran	4,58	5,72	2,42	2,57	2,09
1.g. Lainnya	1,82	6,91	3,48	3,83	1,70
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	11,19	5,30	3,84	3,91	5,99
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,93	4,17	-4,72	10,76	7,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2,28	0,10	3,89	4,63	2,52
4.a. Bangunan	1,68	0,18	6,19	6,86	5,79
4.b. Non-Bangunan	3,31	-0,04	0,04	0,67	-3,65
5. Perubahan Inventori	-159,74	216,05	-32,73	272,95	51,04
6. Ekspor	8,65	-12,40	-8,82	98,33	3,67
7. Impor	0,42	-8,94	-0,20	35,49	-1,43
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	3,84	2,14	2,34	4,44	4,07

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 1.5

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran, 2014-2018

Komponen Pengeluaran (1)	2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017* (5)	2018** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	137,74	140,77	145,18	147,79	150,86
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	142,31	142,95	147,27	150,13	153,51
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	126,81	130,41	132,16	133,66	134,98
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	135,94	142,89	146,02	149,03	150,17
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	135,67	143,84	146,83	148,54	151,05
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	122,50	131,14	137,81	139,77	142,35
1.f. Hotel dan Restoran	132,68	136,86	144,17	144,65	153,42
1.g. Lainnya	118,71	122,98	128,76	130,16	134,04
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	127,66	129,87	137,23	138,63	142,77
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	131,34	134,15	140,71	151,25	158,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	126,63	125,97	128,01	129,05	130,22
4.a. Bangunan	140,84	135,88	135,48	136,04	138,44
4.b. Non-Bangunan	102,86	109,36	114,71	115,85	113,17
5. Perubahan Inventori	361,13	118,77	289,71	101,24	61,23
6. Ekspor	88,34	99,46	100,14	100,43	100,75
7. Impor	118,06	128,55	133,86	137,69	149,60
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	128,21	131,49	132,23	133,47	136,36

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 1.6

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Lahat Menurut Pengeluaran, 2014-2018 (Persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2014 (2)	2015 (3)	2016 (4)	2017* (5)	2018** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,99	2,20	3,13	3,21	3,91
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	7,45	0,46	3,02	3,15	4,23
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	-0,73	2,84	1,34	2,49	2,14
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	-0,77	5,11	2,19	4,30	2,84
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	-0,67	6,02	2,08	3,27	2,87
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,46	7,06	5,09	6,58	3,30
1.f. Hotel dan Restoran	2,21	3,15	5,34	5,69	6,42
1.g. Lainnya	-2,04	3,60	4,69	5,84	4,10
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,96	1,73	5,67	6,75	4,04
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,49	2,14	4,89	12,74	12,83
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	3,01	-0,52	1,62	2,44	1,73
4.a. Bangunan	4,26	-3,52	-0,29	0,12	2,18
4.b. Non-Bangunan	0,56	6,32	4,89	5,93	-1,34
5. Perubahan Inventori	305,03	-67,11	143,91	-14,76	-78,86
6. Ekspor	-3,56	12,59	0,68	0,97	0,61
7. Impor	2,63	8,88	4,14	7,12	11,76
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 - 7)	2,78	2,56	0,56	1,50	3,12

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

<https://lahatkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

<https://lahatkab.bps.go.id>

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____ *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumah tangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.



Sensus
Penduduk
2020

DATA

Mencerdaskan Bangsa



Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat

Jl. Bandar Jaya Lk. III Lahat

Telp. (0731)321416, Fax. (0731)321416

E-mail : bps1604@mailhost.bps.go.id

<http://lahatkab.bps.go.id>

